

## ABSTRACT

*The new generation mobile network 5G is claimed will have access speeds 20 times faster than 4G mobile networks at this time. To anticipate the needs of frequency, then International Mobile Telecommunications Advanced (IMT-Advanced) asked the International Telecommunication Union (ITU) on World Radio Communication 2015 (WRC-2015) to identify frequency 3600-4200MHz for IMT Allocation. This frequency is the Extended C-Band and C-Band for Fixed Satellite Services (FSS) allocation as Downlink frequency (Space-to-earth).*

*In the meantime satellite telecommunications industry rejected it because Extended C-Band and C-Band frequency is still very important for the satellite industry to sustain satellite telecommunications, especially in the tropics where rainfall is high. The Indonesian government, represented by the Directorate General of the Ministry of Communications and Information Technology SDPPI as Indonesian telecommunications regulator decided not identify this frequency as IMT frequency. This research was used to examine Government decision using REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA).*

*Keyword : 5G, satellite, C-Band, Regulatory Impact Analysis*



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

## ABSTRAK

Jaringan selular generasi baru 5G diklaim akan mempunyai kecepatan akses 20 kali lebih cepat dari jaringan selular 4G pada saat ini. Untuk mengantisipasi kebutuhan frekuensi, maka pada *World Radio Communication 2015 (WRC-2015)* komunitas *International Mobile Telecommunication Advanced (IMT-Advanced)* telah meminta kepada *International Telecommunication Union (ITU)* untuk menambah alokasi frekuensi 3600-4200MHz untuk IMT. frekuensi ini adalah frekuensi *Extended-C-Band* dan *C-Band* yang saat ini digunakan oleh *Fixed Satellite Services (FSS)* sebagai frekuensi *Downlink (Space-to-earth)*.

Sementara itu komunitas industri telekomunikasi satelit menentang identifikasi ini karena frekuensi *Extended-C-Band* dan *C-Band* ini masih sangat penting bagi industri satelit untuk menopang telekomunikasi satelit terutama pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo sebagai regulator telekomunikasi Indonesia memutuskan untuk tidak mengidentifikasi frekuensi ini sebagai frekuensi IMT. Penelitian ini digunakan untuk meneliti keputusan Pemerintah dengan *REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA)* atau dikenal sebagai Analisa Dampak Implementasi Undang-Undang.

Keyword : *FSS, IMT, Satellite, dan Regulatory Impact Analysis*

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA